



REPUBLIK INDONESIA

# **SIARAN PERS**

## **Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pengujian UU Pembentukan Provinsi Papua Barat**

**Jakarta, 19 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya terhadap UUD 1945 pada Rabu (21/02), pukul 14.30 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Sorong dan Gubernur Prov. Papua Barat Daya. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 106/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P selaku Bupati Sorong Selatan masa kerja 2021-2024. norma yang diujikan adalah Pasal 3 Ayat (1) Huruf A dan Pasal 3 Ayat (2) UU 29/2022.

Dalam Sidang sebelumnya (05/02), Saksi bernama Marthina Atanay selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mengeklaim, pihaknya masih memberikan pelayanan fasilitas kesehatan di Kampung Botain hingga saat ini. Saksi Pemohon berikutnya, Lamek Kladit, seorang Guru sekaligus Kepala Sekolah Dasar (SD) YPK Patmos Botain mengeklaim, dirinya beserta seluruh pengajar SD YPK Patmos Botain tidak menginginkan Kampung Botain masuk ke wilayah Kabupaten Sorong. Lamek mengatakan, proses mengajar pada 2013-2018 menggunakan operasional dari anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Sorong Selatan.

Selanjutnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan periode 2018 -2023 Ester Homer mengatakan, pada Januari 2023, Kampung Botain sudah tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sorong Selatan setelah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 89 Tahun 2019. Namun, dia mengeklaim, masyarakat Kampung Botain tidak terima karena merasa kampungnya berada di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam sidang tanggal 5 februari lalu, perwakilan Pemerintah pada persidangan saat itu meminta Mahkamah memanggil Pemkab Sorong untuk dijadikan sebagai Pihak Terkait. **(Mimi/MHM)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)